

**PROFIL DESA
DESA TARAJUSARI
TAHUN 2021**



**DESA TARAJUSARI
KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG**

PROFIL DESA TARAJUSARI

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan PP Nomor 72/2005 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Tarajusari adalah Desa yang menghasilkan produk texlite hasil dari perusahaan perusahaan industri ,dan tataguna tanah yang mayoritas lahan pesawahan sangat bagus untuk memacu produktivitas padi karena di tunjang lahan dan pengairan yang mencukupi.

Dengan jumlah penduduk yang tercatat secara administratif yaitu **12.679** jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin **laki-laki** berjumlah **6.187** jiwa, dan **perempuan** berjumlah **6.139** jiwa. Dengan Jumlah **KK 3.479** Dari total jumlah penduduk Desa Tarajusari tersebut, jumlah laki-laki usia produktif sama dengan jumlah perempuan sehingga dengan demikian tetap tenaga produktif cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang dapat dilakukan oleh perempuan.

Kegiatan Pemerintahan Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan Anggaran yang telah tertuang dalam APBD. Kontrol pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa. Pertanggung jawaban pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dilakukan setiap akhir tahun.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun Anggaran adalah,

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4027);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Dana Desa;

14. Peraturan Desa Tarajusari Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun,2020-2025;

B. KONDISI UMUM

- 1. Luas Wilayah Desa : 157.563,00 H
- 2. Batas Wilayah Desa
 - Utara : Berbatasan dengan Desa Sukasari
 - Selatan : Berbatasan dengan Desa Kamasan dan Banjaran
 - Timur : Berbatasan dengan Desa Batukarut
 - Barat : Berbatasan dengan Desa Tanjungsari

- 3 Dusun : 4 (empat)
- 4 Rukun Warga : 14 (empat belas)
- 5 Rukun Tetangga : 56 (lima puluh enam)

- 6 Peruntukan lahan :
 - a.Tanah kering : 130,00 Ha
 - b.sawah : 16.027,00 Ha
 - c.Tanah Fasilitas Umum : 11,00 Ha

7 Kependudukan

- a. Jumlah Kependudukan menurut jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 6.187 jiwa
 - Perempuan : 6.139 jiwa
 - Jumlah : 12.326 jiwa
- b. Jumlah Kepala Keluarga : 3.479 KK
- c. Tempat Tinggal :
 - Tetap : 2.921 KK
 - Musiman : -
- d. Jumlah Penduduk menurut Agama :
 - Islam : 1.731 orang
 - Kristen : 275 orang
 - JUMLAH TOTAL : 2.006 orang
- e. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan :
 - 1) Belum Sekolah : 170 Orang
 - 2) Sekolah Dasar :
 - Tamat : 1.260 orang
 - Belum tamat/Masih Sekolah : 1.823 orang
 - 3) SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 - Tamat : 1.949 orang
 - Blm tamat/Msh sekolah : 1.860 Orang
 - 4) SEKOLAH MENENGAH ATAS
 - Tamat : 1.299 orang
 - Blm tamat/Msh Sekolah : 1.001 orang
 - 5) AKADEMI
 - Tamat : 112 orang
 - Blm tamat/Msh Sekolah : 90 orang
 - 6) UNIRVERSITAS
 - Tamat : 137 orang
 - Blm tamat/Msh Sekolah : 117 orang
- g. Jumlah Penduduk menurut pekerjaan:
 - PNS : 427 Orang
 - POLRI : 18 Orang
 - TNI : 9 Orang
 - Pensiunan : 365 Orang
 - Pegawai Swasta : 1.569 Orang
 - Petani/Boruh Tani : 1.008 Orang
 - Belum Bekerja : 1.311 Orang

8. Bidang Pembangunan

- a. sarana ibadah

- Mesjid : 22 buah
- Mushola : 6 buah
- b. Pendidikan :
 - TK : 5 buah
 - PAUD : 9 buah
 - SD : 4 buah
 - SLTP : - buah
 - SMA : -
- c. Lembaga Pendidikan Keagamaan
 - Madrasah / Guru / Murid : 12 buah
- d. Pos Kamling : 14 buah

9. **Prasarana air bersih**

- a. Sarana
 - MCK : 16 buah
 - Sumur Gali : 2.666 buah
 - Mata air : - buah
 - Hidran Umum : - buah
- b. Pengguna
 - MCK : 314 KK
 - Sumur gali : 2.418 KK
 - Mata Air : - KK
 - Hidran Umum : - KK

10. **Transportasi**

- a. Prasarana :
 - Mobil : 40 buah
 - Motor : 1.246 buah
 - Kretek : 17 buah
 - Becak : 9 buah
 - Ojeg : 81 buah
- b. Sarana
 - 1. Panjang Jalan Kabupaten : 4 km
 - Kondisi
 - > Baik : 2.5 km
 - > Sedang : 0.2 km
 - > Rusak : 1.3 km
 - 2. Panjang jalan Desa : 1 km
 - Kondisi
 - > Baik : 0,7 km
 - > Sedang : 0,2 km
 - > Rusak : 0,1 km
 - 3. Panjang Gang : 13 km
 - Kondisi
 - > Baik : 6 km
 - > Sedang : 2 km
 - > Rusak : 5 km
 - 4. Jembatan : 6 buah
 - 5. Gorong-gorong : 2 buah

KESEJAHTERAAN

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 3.458 kk
- b. Jumlah keluarga Pra Sejahtera : 238 kk
- c. Jumlah Keluarga Sejahtera 1 : 864 kk
- d. Jumlah keluarga Sejahtera 2 : 548 kk
- e. Jumlah Keluarga Sejahtera 3 : 66 kk
- f. Jumlah keluarga Sejahtera 3 Plus : 15 kk
- 12. Prasarana Olah Raga
 - a. Lapang Bulutangkis : 1 buah
 - b. Lapang Bola Volley : 2 buah

- c. Lapang Tenis Meja : 6 buah

KELEMBAGAAN

1. Pemerintahan Desa :
 - Kepala Desa : 1 orang
 - Sekretaris Desa : 1 orang
 - Kepala Urusan : 3 orang
 - Kepala seksi : 3 orang
 - Kepala Dusun : 4 orang
 - Staff : 3 orang
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - Ketua : 1 orang
 - Wakil Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Anggota : 4 orang
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD)
 - Ketua : 1 orang
 - Wakil Ketua : - orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Anggota : 6 orang
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 - Ketua : 1 orang
 - Wakil Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Anggota : 8 orang
5. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
 - Anggota Aktif : 20 orang
 - Non Aktif : - orang
6. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - Ketua : 1 orang
 - Sekretaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Kelompok Kerja : 4 orang
 - Anggota : 126 orang
7. Pos Keluarga Berencana (POS KB)
 - Pos KB : 1 orang
 - Kader posyandu : 126 orang
8. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
 - Ketua : 1 orang
 - Sekertaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Anggota : 2 orang
9. Pusat kesehatan Sosial (PUSKESOS)
 - Ketua : 1 orang
 - Sekertaris : 1 orang
 - Bendahara : 1 orang
 - Anggota : 3 orang

10. Ketua Rw : 14 orang
11. Ketua RT : 56 orang
12. Kelompok Tani(KELTAN)
 - Kelompok Tani I : 20 orang
 - Kelompok Tani II : 20 orang
13. Organisasi Kepemudaan (Karang Taruna)
 - Karang Taruna Tingkat RW : 14 buah
 - Karang Taruna Tingkat Desa : 1 buah

PETA DESA TARAJUSARI



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

- A. Strategi dan arah kebijakan Desa
- Strategi Analisis Kekuatan
- Mempunyai Sumber Daya Manusia yang handal, mempunyai komitmen dalam

- menjalankan tugas bekerja, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan kerja;
- Mampu membangun interdependensi dengan stakeholder dalam menciptakan proses pekerjaan yang selaras;
- Memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan pelayanan public memberikan pembinaan .

Kelemahan

- Keterbatasan kerangka berfikir, karena memerlukan kesamaan Visi & Misi Shareholders (Pemilik) dan Stakeholders (Mitra) dalam membangun dan mengembangkan pemerintahan Desa;
- Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari sistim belum mapan;
- Media tempat mencurahkan pengalaman dan mengali sumber daya untuk mendapatkan inovasi kegiatan pemerintahan Desa (Litbang) belum ada;
- Media tempat melayani urusan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum positif maupun syariat belum ada.

Kesempatan / Peluang

- Adanya regulasi mengenai Otonomi Daerah memacu Pemerintahan Desa bisa melakukan akselerasi pembangunan dan pengembangan di beberapa sector;
- Kebijakan pemerintah dalam memacu hasil produksi lokal;
- Kebijakan pemerintah dalam membantu biaya operasional serta pembangunan dan pengembangan pemerintahan Desa;
- Meningkatnya media / sarana informasi pada masyarakat pedesaan;
- Tumbuhnya kesadaran mengeluarkan pendapat pada masyarakat pedesaan.

Tantangan

- Dalam era globalisasi dituntut kompetensi karena daya persaingan yang tinggi;
 - Dukungan Pemerintah yang instabilitas dan perekonomian nasional yang fluktuatif;
 - Kontinyuitas kesadaran terhadap pentingnya bermusyawarah belum stabil;
 - Kebijakan dan stabilitas politik Negara dan dunia internasional.
- Era globalisasi mempercepat perubahan budaya induk dan gaya hidup serta meracuni orginalitas culture.

Strategi Umum

Perasaan aman, nyaman, tentram, sehat dan indah merupakan dambaan setiap individu manusia yang diam disuatu tempat . setiap individu menginginkan dilayani dengan baik, apabila sedang melakukan interaksi dengan berbagai hal yang dibutuhkan.

Setiap individu menginginkan fasilitas yang lengkap dalam memenuhi seluruh kegiatan sosialnya, maka sebagai sarana mediasi seluruh keinginan individu tersebut sangat dibutuhkan keikutsertaannya secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, pemeliharaan serta pengembangan hasil yang dicapai, karena hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan dari sebuah upaya pembangunan dalam bentuk apapun.

Untuk itu strategi yang dibangun meliputi :

1. Optimalisasi potensi sumber daya lokal (Manusia dan Alam)
2. Mediasi secara maksimal dan proporsional sesuai kontek masalah
3. Peningkatan produktivitas pelayanan public (training penerapan teknologi)
4. Rehabilitasi budaya kerja (Tata cara bekerja dan bermasyarakat)
5. Melakukan penelitian dan pengembangan yang berkopenten dengan kegiatan yang dikembangkan
6. Perbaikan system pelayanan publik
7. Antisipasi dinamika kehidupan social, ekonomi, politik, budaya, keamanan, agama, dan iklim kebijakan pemerintah serta dinamika iklim budaya lingkungan bekerja
8. Edukasi sistim dan teknologi
9. Pemetaan secara intensif, akurat dan objektif
10. Optimalisasi sistim yang dibangun dan dikembangkan

11. Membangun trend dan mengembangkan image positif terhadap sistim Pemerintahan Desa yang dijalankan.

Strategi Pengembangan pemerintahan

Pemerintahan Desa didalam mengemas operasional kegiatan melakukan strategi struktural dari hulu ke hilir , yang disusun oleh komponen (Program kerja dan proyek yang dikembangkan). Tetapi Pemerintah Desa dalam operasionalnya tidak menutup diri dalam mengembangkan sistim yang dibangunnya, ketika berhubungan dengan pihak lain untuk membangun sistim hulu hilir yang sinergi.

Pengembangan dari kegiatan yang dibangun kepada 2 (Dua) unit bagian :

1. Unit kegiatan berbasis Sumber daya Alam (SDA)
Tersedianya Sumber Daya Alam di wilayah Pemerintahan Desa merupakan salah satu anugerah yang membutuhkan proses pengelolaan secara konprehensif, sehingga bisa menghasilkan suatu manfaat. Salah satu Sumber Daya Alam yang ada di Desa Tarajusari adalah kawasan pertanian dengan beragam komoditas yang diusahakan oleh masyarakat.
Untuk meningkatkan ketahanan pada bidang usaha ini membutuhkan penguasaan yang mandalam, karena pertanian bersifat dinamis, maka manfaat yang diharapkan dari pengelolaan Sumber Daya Alam ini meliputi :
 - a. Berdirinya unit kerja milik Desa (BUMDES)
 - b. Berdirinya kelompok – kelompok Kerja /usaha (home industri)
 - c. Terbangunnya sistim penjualan produksi
 - d. Naiknya nilai jual petani/pengusaha

Dalam mengembangkan program ini dibutuhkan :

 - Penyediaan bahan baku (bibit dan sarana produksi)
 - Riset dan development (R&D)
 - Edukasi kepada pelaku usaha (pengembangan teknologi dan menejement)
 - Pengelolaan hasil produksi, pemasaran dan distribusi
2. Unit kegiatan berbasis Sumber Daya Manusia (SDM)
Sasaran yang paling utama adalah bagaimana peran pemerintah Desa dalam menaikkan strata Sumber Daya Manusia, karena pada manusialah semua ini diserahkan. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini meliputi :
 - a. berdirinya tempat belajar formal bagi masyarakat tidak mampu
 - b. terbangunnya kerjasama pengelolaan pendidikan informal dengan pendidikan formal
 - c. peningkatan daya piker dan kemampuan berwacana pada masyarakat

dalam pengembangan program ini dibutuhkan :

 - Para counselor yang berpengalaman dibidang pendidikan dan pengelolaan sumber daya manusia
 - Penerapan hasil riset bagi pendidikan informal/luar sekolah
 - Para pemerhati dan relawan peningkatan Sumber Daya Manusia

Strategi Pengembangan institusi

Menjalankan sebuah kegiatan pada dasarnya diawali dari sebuah ide atau gagasan yang dilahirkan dari institusi atau kajian , idealnya pelaksanaan kegiatan lahir dari gagasan yang telah dilakukan percobaan atau uji kelayakan yang akan dikembangkan, kemudian berkembang

dalam bentuk kegiatan dengan skala dan waktu terbatas (waktu dan tolak ukur tertentu).Setelah dipandang menuju trend positif, maka ditingkatkan menjadi salah satu kegiatan andalan.

Didalam pembangunan dan pengembangan institusi di tingkat Pemerintahan Desa dapat ditandai dengan kemampuan/kapasitas manajemen menggulirkan gagasan memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu tertentu, ini akan terus dikembangkan sampai pada titik mandiri (mampu menjalankan manajemen dengan dinamikanya).

Metode dalam mengembangkan aktivitas lembaga-lembaga yang ada di Desa ini melalui swakelola/mandiri, kerja sama, patungan atau merger dengan lembaga lain.sebagai institusi dibidang pelayanan masyarakat, dibutuhkan pengembangan dalam bidang Sumber Daya Manusia dan pengembangan Sumber Daya Alam serta penyediaan sarana dan prasarana juga tersedianya counselor yang berpengalaman.

Struktur organisasi bersifat dinamis mengikuti tuntutan situasi dan manajemen, namun secara makro unsur yang terlibat dalam organisasi terdiri :

1. Shareholders merupakan kumpulan dari pemilik (Pemerintah dan Masyarakat) yang diorganisir sekaligus merangkap menjadi operator manajemen sesuai dengan perkembangannya maka para shareholders bisa mengangkat perwakilan shareholders untuk mengawasi jalannya manajemen organisasi melalui musyawarah;
2. Stakeholders merupakan mitra kerjasama dalam mengembangkan kegiatan organisasi Pemerintahan Desa dan masyarakat dalam bentuk investasi modal, pengembangan teknologi, manajemen, saran/media ekspansi akan terus dijaga keberadaannya sampai titik organisasi stabil dalam segala hal
Manajemen merupakan seluruh jajaran pelaksana organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah

Sistim perencanaan

Perencanaan sebuah kegiatan unit/lembaga yang dikembangkan secara hierarki melalui tahapan :

- Strategic planning, merupakan rencana strategi yang memuat cita-cita, prinsip dasar dan garis-garis kebijakan yang berlaku.
- RPJM DESA Merupakan rencana organisasi yang memuat target-target dan sasaran dalam rentang waktu 6 (enam) tahun.
- RKP Desa yang menjabarkan rencana kegiatan selama 1 tahun
- Annual Operating Plant (AOP) atau rencana kerja tahunan adalah rencana organisasi yang memuat target dan sasaran dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun
- Monthly Operating Plant (MOP) adalah rencana operasional bulanan dalam merealisasikan rencana tahunan, merupakan kumpulan dari rencana Operasional yang dibuat dalam jangka waktu sesuai siklus kegiatan.

Perencanaan aktivitas kegiatan disusun dengan bahan yang diakumulasikan secara bottom up (dari bawah ke atas) maupun top down (dari atas ke bawah) melalui proses kajian kelayakan mikro dan makro lintas unit/lembaga kegiatan serta pada forum top manajemen.

Sistim Operasional

- Akuntabilitas sebagai unit pengelolaan administrasi dari seluruh aktivitas yang dilakukan unit-unit kegiatan, mengelola perencanaan keuangan (cash flow) dan melakukan analisa keuangan/budget terhadap sebuah rencana dan pelaksanaan kegiatan.
Pelaksanaan / operasional manajemen dilakukan oleh unit/lembaga dan perangkat desa yang
- dikendalikan dan dimobilisasi oleh seorang pimpinan agar operasi dan aktivitas kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Panganggaran dari sebuah rencana unit-unit kegiatan disentralisir berdasarkan usulan rencana operasional dan realisasinya berdasar pada kemampuan aliran kas, keseimbangan aliran kas dari seluruh unit kegiatan.

Sistim kontrol

Pengendalian /kontrol ditujukan untuk mendapatkan nilai efektif dan efisien dalam operasional/aktivitas manajemen, aspek yang dikendalikan meliputi aktivitas manajerial, unit kegiatan, keuangan, asset dan personalia. Metode pendekatan pada aktivitas secara fisik dan administrasi meliputi :

1. Pengawasan/pemeriksaan, sebagai tindakan kewenangan struktural dalam mengawasi, memeriksa dan mengarahkan serta memberikan solusi permasalahan bagi sebuah aktivitas/kegiatan;
 2. Pengendalian sebuah aktivitas / kegiatan dilakukan untuk mengawasi realisasi rencana operasional dari sisi target, efesiensi dan efektivitas;
 3. Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan suatu aktivitas/kegiatan serta melakukan analisa sebagai masukan bagi operasional manajemen guna mengevaluasi kinerja dari sebuah aktivitas/kegiatan (efektivitas dan efesiensi) serta merumuskan upaya-upaya perbaikan yang diperlukan;
 4. Pengendalian keuangan, mencakup sejauhmana suatu aktivitas/kegiatan dapat berjalan on budget atau lebih efisien dengan tolok ukur rencana anggaran biaya dari rencana Operasional yang disetujui secara rasional antara bukti fisik dan administrative.
- Pengendalian personal, mengacu dan mempertimbangkan :
- Pendekatan norma (ketaatan personal atas norma-norma kepegawaian yang berlaku umum/peraturan-peraturan kerja mengenai kepegawaian)
 - Pendekatan proses, yakni kontribusi personal dalam proses operasional pekerjaan
 - Pendekatan output yaitu kontribusi personal dalam membangun produktivitas kerja
 - Pendekatan interaktif yaitu kontribusi personal dalam membangun kerjasama team
 - work Pendekatan korsa yaitu kontribusi personal dalam membangun komitmen kolektif dibawah panji-panji organisasi/lembaga pemerintahan desa.

Seluruh sistim yang dibangun harus diikuti dengan pengembangan system apresiasi dan reward system yang terstruktur dalam keseluruhan system pengembangan sumber daya manusia.

c. PRIORITAS DESA

Dengan populasi penduduk yang begitu cepat yang tidak dibarengi dengan perencanaan tata ruang wilayah, semakin tidak jelasnya fungsi antara ruang publik dan ruang personal, akibatnya kesehatan lingkungan, fasilitas umum, keindahan lingkungan dan ekosistem semakin terganggu, mahalnya biaya dan system pendidikan ditingkat lanjutan memunculkan problema yang semakin hari semakin kompleks, pengangguran yang diakibatkan PHK dan pengangguran lainnya semakin banyak bertambah.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, muncul pandangan-pandangan yang membiasakan tatanan kehidupan, sasaran yang paling mudah mereka pengaruhi adalah para pemuda yang sedang galau dalam mencari identitas diri, ini disebabkan kurangnya sarana pemuda dalam menyampaikan aspirasi bakat dan keterampilan. Maka apabila hal ini terus dibiarkan tidak tertutup kemungkinan akan munculnya bencana dalam bentuk krisis sosial, budaya dan wabah penyakit, sehingga konsep pelayanan publik tidak hanya dalam wacana dan retorika belaka, tetapi dibutuhkan para pejuang untuk melaksanakannya secara konsisten dan konsekwen, inipun tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan sebuah kebijakan dan legalitas dari semua komponen secara konprehensif.

Desa Tarajusari merupakan salah satu Desa yang mayoritas mata pencaharian penduduknya dari hasil upah pekerja di perusahaan Textile selama ini prasarana yang telah dibangun masih belum mencapai titik optimal, guna menunjang lancarnya distribusi alat dan hasil produksi perlu dilakukan pembangunan infrastruktur pada seluruh aktivitas yang dilakukan masyarakat.

Prioritas pembangunan Desa Tarajusari diarahkan pada masalah utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan kepemilikan potensi yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, prioritas pembangunan Desa Tarajusari adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Pembangunan sarana dan prasarana publik.

3. Tata kelola pemerintah desa.
4. Menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Dengan dilakukannya aktivitas/kegiatan pembangunan secara optimal sangat berpengaruh besar pada :

- a. Terjaganya kualitas hasil dan alat produksi.
- b. terjadinya percepatan distribusi hasil dan produksi.
- c. Mengurangi resiko kecelakaan kerja.
- d. Menaikan standar pendapatan.
- e. Kenyamanan dan keindahan lingkungan.

Disamping prasarana yang harus terus dibangun dan dikembangkan dalam menunjang aktivitas usaha masyarakat, maka Pemerintah Desa membutuhkan pengembangan sarana yang sudah berhasil dibangun diantaranya :

1. Perbaikan dan pengembangan sarana pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Perbaikan pengembangan sarana pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan melalui pelatihan dan bimbingan teknis khusus berdasarkan bidang masing-masing.
3. Perbaikan sarana / infrastruktur , kesehatan lingkungan dengan merehab rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh.
4. Pengembangan sarana air bersih dan MCK

Guna meningkatkan data yang akurat dalam pencatatan jumlah penduduk serta untuk mengetahui dan menanggulangi kegiatan yang terjadi di masyarakat perlu dilaksanakan langkah-langkah :

- Pendataan ulang jumlah penduduk secara menyeluruh.
- Pencatatan penduduk yang telah mempunyai KTP dengan merekap nomor KTP setiap pemiliknya di tiap-tiap RT dan RW.
- Mencatat seluruh jumlah penduduk yang lahir, meninggal, pindah dan datang.
- Menyediakan tempat pemakaman umum.
- Membangun fasilitas/sarana keamanan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum, melalui pembinaan kesadaran hukum serta menyediakan alat informasi dan transportasi di tiap-tiap lingkungan serta diberdayakannya pelindung masyarakat (LINMAS)
- Terbentuknya Forum Komunikasi Pihak Polisi dan Masyarakat (FKPM)

KEWENANGAN DESA

A. Urusan Hak Asal Usul Desa

1. Pelaksana kegiatan

- Pembinaan dan pengembangan seni Budaya local
- Pendataan aset Desa terutama tanah kas dan menentukan batas batas Desa.

2. Tingkat pencapaian

- Arus informasi yang mudah diserap berpengaruh besar terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, sehingga pencapaian dalam melestarikan seni dan budaya local belum maksimal
- Pendataan aset Desa terutama masalah batas-batas Desa perlu adanya Perdes bersama diantara Desa yang berbatasan.

3. Satuan pelaksana kegiatan Desa

seluruh kegiatan Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari unsur :

- PKK bagi kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembinaan kesehatan yang berkaitan dengan kewanitaan.
- LPMD menaungi dan membina seluruh aspek kegiatan yang ada di Pemerintahan Desa berdasarkan konteks kegiatan yang disesuaikan dengan bidang/seksi yang ada.
- BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat, menganalisa dan memberikan masukan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa guna perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan Desa.
- Karang Taruna bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan pemuda dan masyarakat pada umumnya.
- Linmas, RT/RW, MUI dan atau yang ada dilibatkan jika ada pelaksanaan program

yang perlu ditangani bersama dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

4. Data Perangkat Desa

- a.

Unsur Staf atau Pelayanan

• Sekretaris Desa

: NUNUNG KURNIA

• Kepala Urusan Umum

: SUMARNA

• Kepala Urusan Keuangan

: DADANG NUGRAHA

• Kepala Urusan Perencanaan

: BAYU SUGARA I.P

- Staf I

: DUDIH DURAHMAN

- Staf II

: NURYADI

- Staf III

: YUSDIAN MARDIANA
- B.

Unsur Pelaksana Tekhnis

• Seksi Pemerintahan

: GINGIN GINANJAR

• Seksi Pelayanan

: RUDI YONO

• Seksi Kesejahteraan

: ANDRIANSYAH
- b.

Unsur Wilayah

• Kepala Dusun I

: ASEP RUDI RUDianto

• Kepala Dusun II

: DEDEN LESMANA

• Kepala Dusun III

: ANWAR ABIDIN

• Kepala Dusun IV

: ANDRI HERMAWAN

5. Proses Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan yang bersifat fisik perencanaan pembangunannya dilakukan melalui proses musyawarah dalam menentukan nilai-nilai prioritas.

6. Sarana dan Prasarana

Sarana penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Desa Tarajusari terbagi pada sarana fisik bangunan Kantor, Gedung olah raga, insfrastruktur jalan dan penunjang lainnya lembaga lembaga yang ada, sebagai pelaksana publik sebagai berikut.

| No | Sarana | Prasarana | Lembaga Pelaksana |
|----|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | Kantor Pemerintah Desa | Pasilitas perkantoran lengkap | Pemerintah Desa |
| 2 | Kantor BPD | Komputer lengkap | BPD |
| 3 | Kantor LPMD | Pasilitas kantor | LPMD |
| 4 | Gedung Olah Raga | Lapang Badminton | Pemerintahan Desa |
| 5 | Bidan Desa | Pasilitas Lengkap | Bidan Desa |
| 6 | Kantor BUMDES | Pasilitas perkantoran lengkap | Bumdes |
| 7 | Kantor Puskesmas | Pasilitas perkantoran lengkap | Puskesmas |
| 8 | Perpustakaan | Kursi tamu, Lemari | Pemerintah Desa |
| 9 | Mesjid | - | MUI |
| 10 | Mushola | - | DKM |
| 11 | Kantor Karang Taruna | Komputer lengkap | Karang Taruna |
| 12 | Balai RW | Fasilitas Warga | Warga RW |

7. Permasalahan dan Penyelesaian

Pada umumnya permasalahan yang muncul di pedesaan adalah permasalahan klasik seputar kehidupan masyarakat kecil di pedesaan dengan kategori masalah diantaranya :

| No | Permasalahan | Penyelesaian | Pelaksana |
|----|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Tindak pidana ringan | Pembinaan, Perjanjian | Pemerintahan |
| 2 | Perselisihan | Musyawarah | Pemerintahan |
| 3 | Pengangguran | Pembinaan, penyaluran kerja | Pemdes |
| 4 | Usia wajib belajar | Membuka KBM | Pemdes, RW, Tomas |
| 5 | Rumah tidak layak huni | Perbaikan | Pemdes |
| 6 | Warga miskin | Lapangan kerja | Pemdes |
| 7 | Warga rawan Sosial | Peningkatan ekonomi | Pemdes |

B. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan kegiatan

Kabupaten / Kota kepada Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Kabupaten Bandung. Kegiatan pelaksanaan masih bersifat sosialisasi kepada seluruh jajaran masyarakat dan lembaga yang ada di Wilayah kerja Pemerintah Desa, melalui pembuatan rancangan Peraturan desa.

2. Tingkat pencapaian

Mulai mendapat hasil yang positif dan peningkatan yang signifikan di dalam pembangunan di wilayah Desa baik di bidang kegiatan fisik, ekonomi, dan sosial budaya.

3. Realisasi Program

Sosialisasi Permendagri Nomor 113 tahun 2015 dan Perda Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2007 dengan kegiatan membuat rancangan Peraturan Desa tentang pengaturan kewenangan yang diberikan kepada Desa.

4. Satuan pelaksana kegiatan

Kepala Desa dan Perangkat Desa

VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA TARAJUSARI

Visi Misi Kabupaten Bandung

Visi Kabupaten Bandung

TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PEDESAAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.

Makna dari Visi tersebut diatas adalah:

Repeh Rapih Kerta Raharja adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tentram, damai, sejahtera, senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmaat dari Allah SWT.

Akselerasi Pembangunan atau percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Partisipatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Sesuai dengan paradigma pemerintahan yang baik, bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subyek yang turut membantu mengarahkan pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhan secara profesional dan bertanggungjawab.

Religius mengandung pengertian bahwa norma-norma semangat dan kaidah agama khususnya islam diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung harus menjiwai, mewarnai, menjadi roh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Kultural mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial.

Pemngembangan budaya Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Berwawasan lingkungan mengandung pengertian perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa mengandung pengertian, bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan Perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pembangunan desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintah desa dan pemberdayaan di pedesaan, Desa yang dalam susunan pemerintah merupakan unit pemerintahan terendah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan locus yang menjadi muara seluruh aktivitas pembangunan.

Misi Kabupaten Bandung

untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

- i. MENINGKATKAN PROPESIONALISME BIROKRASI (GOOD GOVERMENT AND CLEAN GOVERMENT)
- ii. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA / SDM/ (PENDIDIKAN , KESEHATAN, MEMANTAPKAN KESALEHAN SOSIAL BERLANDAKAN IMAN DAN TAQWA)
- iii. MEMANTAPKAN PEMULIHAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
- iv. MENGGALI, MENUMBUHKEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA SUNDA SERTA KEARIFAN LAINNYA

- v. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAAAN.
- vi. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KWALITAS INFRASTRUKTUR SERTA KETERPADUAN PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH
- vii. MENINGKATKAN PARTISIPASI SEKTOR SWASTA, PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DAN DAYA SAING DAERAH.

Visi – Misi Kepala Desa Tarajuari

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Tarajusari yang Adil Dan Sejahtera Melalui Pemantapan Pembangunan yang Berkelanjutan dengan Dilandasi Iman dan Taqwa”

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Bersih Berkeadilan;
2. Menciptakan Kondisi yang Aman Tertib, Damai dan Harmonis;
3. Memelihara Pemerataan Pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap Menjaga Keseimbangan Lingkungan;
4. Meningkatkan Kualitas, Sumber daya Manusia dan Pola Sehat Berlandaskan Iman dan Taqwa;
5. Mengembangkan Potensi Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat;

4.3 Prioritas Pembangunan Desa Tarajusari

Prioritas pembangunan Desa Tarajusari diarahkan pada masalah utama yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Tarajusari dan kepemilikan potensi yang ada. Berdasarkan hal tersebut, prioritas pembangunan Desa Tarajusari adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan
2. Meminimalisir Pengangguran
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana publik
4. Tata Kelola Pemerintahan Desa
5. Menjaga keseimbangan Lingkungan Hidup.

PENUTUP

Salah satu kunci keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam menghadapi kondisi dan situasi seperti sekarang ini, adalah dengan mengembangkan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal. dengan demikian diharapkan mekanisme rumusan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Daerah dapat dibangun, sehingga keberadaan ekonomi Daerah akan lebih bermakna yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Desa harus dapat mendayagunakan potensi sumber daya local secara optimal, yang memungkinkan berkurangnya tingkat ketergantungan Pemerintah Desa terhadap Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Desa dituntut mampu meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa, melaksanakan reformasi akuntansi keuangan Desa dan manajemen keuangan Desa, melaksanakan perencanaan strategis secara benar, sehingga akan memacu terwujudnya otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab yang dapat memperkuat basis perekonomian Desa, serta memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menyongsong era perekonomian global.

KEPALA DESA TARAJUSARI

ULI MULIA